

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan, urusan wajib pelayanan ini nantinya terbagi atas pelayanan dasar dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar. Pemerintah Kota Bukittinggi melaksanakan tiga jenis pelayanan dasar dalam SPM ini berupa Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan. Dalam mewujudkannya Kota Bukittinggi mampu memberikan anggaran lebih sebesar 25% dari total dana APBD Kota dalam melaksanakan 8 program yang memuat 18 kegiatan dan 70 sub kegiatan dari 57 UPTD sekolah dengan 122 sub kegiatan lanjutannya. Tidak hanya melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam menjaga mutu pelayanan dasar yang selalu dilakukan setiap tahun secara berkala, namun pada Tahun 2022 ini setelah lepas dari masa pandemi, Kota Bukittinggi kemudian meluncurkan banyak program penunjang dalam Program Unggulan Pemerintah Bukittinggi (PUPB) yang berfokuskan kepada pelaksanaan pendidikan berbudaya PKBAM, pendidikan sosial-agamais, dan pelaksanaan uji coba sekolah digital, beserta pelaksanaan pemberian bantuan biaya personal peserta didik untuk pendidikan sekolah menengah atas dalam program kebijakan BKK. Dengan hasil akhir kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan yang terbaik di angka pencapaian SMP sebesar 97%, dengan kekurangan di kategori pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi sertifikasi S1/D-IV.



Pelaksanaan urusan wajib pemberian pelayanan dasar pendidikan ke seluruh pelajar se-Kota Bukittinggi ini akan menghasilkan output agar terpenuhinya pelaksanaan proses belajar mengajar siswa, terpenuhi seluruh kenyamanan dan fasilitas sekolah selama pembelajaran, dapat melahirkan putra putri terbaik Kota Bukittinggi yang pintar berwawasan, memiliki budi pekerti, etika yang baik dan memiliki dasar agama yang tidak mudah goyah sesuai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Kemudian outcome pelaksanaan SPM ini akan menaikkan angka rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun (hingga tamat pendidikan sekolah menengah pertama) tanpa ada kekurangan dan mampu menjadi sumber daya manusia yang potensial untuk mengabdikan dalam membangun negeri.

Penggunaan landasan pemikiran *Public expenditure management* dari Cheryl Williamson Grey ini mampu membawa peneliti untuk melihat lebih jauh bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah agar penganggaran belanja yang akan dilaksanakan dapat dibelanjakan secara benar hingga ke rupiah terakhir, dengan terlebih dahulu menganalisa bagaimana kinerja pemerintah yang sudah terjadi (*review policy*), kemudian bagaimana gambaran kebijakan apa saja yang harus dirumuskan pemerintah kota (*set policy and undertake planning activity*), kemudian mengalokasikan anggaran yang tersedia untuk belanja komponen apa saja, kemana dana anggaran tersebut akan dihabiskan (*mobilize and allocate resource*). Selanjutnya bagaimana pemerintah kota kemudian menjalankan yang sudah ditetapkan (*implement planned activities*), mengawasi dan melakukan pencatatan laporan selama berkegiatan (*monitor and account*), hingga seluruh pelaksanaan ini kemudian akan dievaluasi audit hasil kinerjanya (*evaluate and audit*).



Namun demikian landasan pemikiran ini peneliti melihat menjelaskan bagaimana pemerintah daerah untuk bertindak, harus melakukan ini dan menjalankan ini, *governance should do this, do that*, dengan pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, namun kurang dapat menjelaskan bagaimana jika ada pemerintahan yang lebih di atasnya, seperti pemerintahan pusat, yang dalam pelaksanaan program pendidikan ini banyak memberikan arahan kepada pemerintah daerah sehingga terlalu mengintervensi terhadap kegiatan pemerintah di daerah. Padahal bentuk dan bagaimana cara pemerintah daerah menjalankan pendidikannya di setiap daerah akan berbeda-beda. sesuai kondisi sosial budaya yang ada.

maka, menutupi kekurangan landasan pemikiran ini, peneliti selanjutnya merekomendasikan untuk pada penelitian selanjutnya mengkombinasikan dengan teori lain yang membahas penganggaran publik dengan manajemen perang stakeholder, manajemen program dan manajemen lainnya yang akan di sesuaikan kembali dengan kebutuhan analisis penelitian.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, maka peneliti memiliki saran penelitian sebagai berikut.

1. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Pelaksanaan pemberian pelayanan standar minimal sudah terlaksana dengan baik secara keseluruhan sudah hampir mencapai angka target di 100%, seluruh kebutuhan dalam proses belajar mengajar baik itu untuk buku tulis siswa, perlengkapan belajar siswa, kebutuhan buku pelajaran, pelaksanaan rehab sarana



dan prasarana sekolah dan sebagainya sudah dipenuhi, namun berdasarkan laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal Tahun 2022 masih ada beberapa hal yang perlu menjadi target prioritas dalam pencapaian standar pelayanan minimal yang sempurna, terutama seperti yang terlihat yaitu pada tenaga pendidik, untuk kualifikasi tenaga pendidik masih banyak yang belum mencapai target, diantaranya kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV untuk pendidikan anak usia dini, kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV pada pendidikan dasar, Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C pada pendidikan dasar, serta PKBM terakreditasi C pada pendidikan kesetaraan yang masih jauh dibawah target. Sehingga diharapkan untuk pelaksanaan standar pelayanan minimal pada tahun anggaran selanjutnya tetap mempertahankan yang sudah baik dan melaksanakan lebih giat untuk point yang masih belum mencapai target.

Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi perlu memperhatikan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang untuk sarana dan prasarannya yang harus diperhatikan kembali untuk kemudian dapat dianggarkan lebih anggaran operasionalnya, bisa jadi di dalam lingkungan sekolahnya ataupun sekitaran luar sekolahnya, seperti sekolah SMP 4 Bukittinggi dan SDN 13 Bukit Apit, yang jika dalam keadaan hujan dan banjir akan sangat membahayakan anak-anak sekolah.

2. Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil laporan standar pelayanan minimal pemerintah kota pada Tahun 2022 yang lalu disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mengalami sedikit hambatan karena adanya pengurangan porsi



anggaran dinas dalam APBD Kota Bukittinggi, hal ini tentu saja akan sedikit banyaknya mempengaruhi pelaksanaan program-program yang sudah di targetkan. Sehingga diharapkan Badan Keuangan Kota Bukittinggi akan melihat urgensi anggaran yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan menambahkan anggaran yang dibutuhkan.

3. Pemerintah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi dikenal sebagai salah satu kota pendidikan terbaik di Sumatera Barat, tentu saja prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini akan menjadi harga diri pemerintah kota dalam mempertahankan kualitas telah ada. Namun berkaca kepada laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 disebutkan bahwa Kota Bukittinggi dalam pelaksanaannya nyaris sempurna di angka 97%, kekurangan yang terjadi berada di kualitas tenaga didik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dan prioritas bersama karena ini menyangkut kepada kualitas dari pelaksana belajar mengajar yaitu guru yang masih jauh tertinggal kualifikasinya, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan banyak tenaga didik yang disekolahkan, ataupun merekrut tenaga didik baru yang jauh lebih berkualitas, dan tidak lupa juga untuk tetap mempertahankan semua program yang sudah berjalan secara baik, menjaga kualitas yang ada dan semakin gencar untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan minimal pendidikan kepada seluruh warga pelajar agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi yang juga berkualitas nantinya. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperhatikan tidak hanya dalam sekolah saja namun juga pelaksanaan fasilitas



kenyaman bagi peserta didik di lingkungan sekitar sekolah seperti pada kasus sekolah di Bukit Apit tersebut.

